

Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak: Studi Literatur Review

Corporate Governance and Tax Avoidance: Study Literature Review

Citra Windy Lubis^{a,1}, Rafriandi Nasution^{b,2}, Dinda Ramadhani^{c,3}

^aProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Potensi Utama^{a,c}

Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia^b

Citra.windylubis@gmail.com¹, RafriandiNst@gmail.com², Dinda_Ramadhani@gmail.com³

ABSTRAK

Penghindaran pajak menjadi topik yang semakin diperhatikan dalam debat politik dan intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak dengan menggunakan pendekatan teori agensi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review dengan menggunakan 33 artikel yang membahas tentang topik penghindaran pajak yang dilakukan pada periode tahun 2006 – 2022. Tren penelitian yang ditemukan dalam studi literatur ini adalah menggunakan variabel struktur kepemilikan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Struktur kepemilikan dalam penelitian yang digunakan sebagai indikatornya adalah kepemilikan keluarga dan kepemilikan non-keluarga. Hasil dari penelitian ini melihat dari pengaruh yang ditimbulkan dari sistem tata kelola perusahaan yang berbeda pada penghindaran pajak bergantung pada kepentingan pemangku kepentingan mana yang disalurkan oleh masing-masing mekanisme individu setelah mensintesis hasil penelitian yang dipublikasikan. Akibatnya, sejauh mana perusahaan menghindari pajak bergantung pada kepentingan pemangku kepentingan dan kapasitas mereka untuk mengejar kepentingan tersebut melalui prosedur tata kelola perusahaan. Sehingga semakin tinggi penghindaran pajak akan menghasilkan peningkatan biaya penghindaran (bukan pajak) yang lebih besar daripada manfaat penghindaran pajak, sedangkan semakin rendah penghindaran pajak akan mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran pajak yang lebih besar dari keuntungan membayar pajak.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, ETR, Insentif, Pemegang Saham, Komposisi Dewan, Struktur Kepemilikan Auditor

ABSTRACT

Tax Avoidance is a topic of increasing interest in political and intellectual debate. The purpose of this study is to provide an overview of research related to tax avoidance using the agency theory approach. The methodology used in this study is a literature review study using 33 articles discussing the topic of tax avoidance conducted in the period 2006 – 2022. The research trend found in this literature study is to use the ownership structure variable as a variable that influences tax avoidance. The ownership structure in the research used as an indicator is family ownership and non-family ownership. The results of this study look at the effects of different corporate governance systems on tax avoidance depending on which stakeholder interests are channeled by each individual mechanism after synthesizing published research results. As a result, the extent to which companies avoid taxes depends on the interests of stakeholders and their capacity to pursue those interests through corporate governance procedures. So that the higher the tax avoidance will result in an increase in the cost of avoidance (non-tax) which is greater than the benefit of tax avoidance, while the lower the tax avoidance will result in an increase in the cost of paying taxes which is greater than the benefit of paying taxes.

Keywords : Tax Avoidance, ETR, Incentives, Shareholders, Board Composition, Ownership Structure Auditors

Info Artikel :

Disubmit: 13 Desember 2022

Direview: 20 Januari 2023

Diterima: 29 Januari 2023

Copyright © 2022 – Accumulated Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Salah satu biaya paling signifikan untuk bisnis tertentu adalah perpajakan, yang juga merupakan sumber pendapatan fiskal paling signifikan bagi pemerintah. Perusahaan yang menghindari pajak dengan perencanaan pajak yang sah dan penggelapan pajak yang tidak etis. Perencanaan pajak mengacu pada penurunan beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan aktivitas komersial yang sesuai dengan aturan pajak. Di luar penghindaran pajak, penghindaran pajak melibatkan apakah perusahaan melanggar undang-undang perpajakan dan aturan terkait untuk menghindari pembayaran tanggung jawab pajaknya. Penghindaran pajak adalah seperangkat taktik persiapan pajak yang tertutup, menurut Hanlon dan Heitzman (2010). Set tertutup memiliki penghindaran pajak yang sah di satu sisi dan ketidakpatuhan, penghindaran, dll. Masyarakat umum telah memperhatikan penghindaran pajak sebagai akibat dari cerita media mengenai strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Penghindaran pajak juga menjadi topik yang semakin diperhatikan dalam debat politik dan intelektual. Bukti anekdot terbaru tentang perusahaan seperti Apple, Facebook, dan Starbucks (Davis, Guenther, Krull, & Williams, 2016), serta contoh lama seperti Enron dan Tyco, telah memberikan Kesan bahwa penghindaran pajak dalam bentuknya yang paling mencolok adalah hal yang umum terjadi di dunia bisnis saat ini. Namun demikian, terlepas dari kepercayaan yang dipegang secara luas ini, banyak bisnis yang sebenarnya membayar pajak yang signifikan setiap tahun. Perpajakan diatur dalam perundang-undangan yang berisi segala aturan dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perpajakan memberikan banyak kemungkinan untuk memotong pajak, beberapa bisnis secara aktif menghindari pembayaran pajak sementara yang lain memiliki tarif pajak efektif yang hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari tarif pajak wajib (Dyrend, et al 2017).

Ketika perusahaan yang menghindari pajak akan meningkatkan arus kas dan pendapatan setelah pajak (Austin & Wilson, 2017), hal tersebut dapat diantisipasi untuk kepentingan pemegang saham, yang merupakan penuntut perusahaan (Rego & Wilson, 2012). Mempertahankan arus kas internal yang mungkin masuk ke pemerintah adalah komponen kunci dari penghindaran pajak. Sumber daya ini dapat mengakibatkan peningkatan nilai pemegang saham bagi perusahaan. Namun, masalah keagenan yang dihasilkan dari pembagian pemegang saham dan manajemen dapat melemahkan tautan penghindaran pajak/nilai pemegang saham ini karena berbagai alasan. Pertama, pemisahan antara pemegang saham dan manajemen dapat memberikan manajer kesempatan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak untuk bertindak egois, yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Untuk mencegah pengungkapan penghindaran pajak kepada otoritas pajak, bisnis dapat menyembunyikan tindakan terkait pajak mereka melalui transaksi rahasia dan rumit. Kurangnya transparansi bagi pemegang saham adalah kelemahan lain dari taktik ini. Ketiga, menghindari pajak dapat mengakibatkan kerusakan reputasi jangka panjang. Keempat, penghindaran pajak mungkin tidak konsisten. Manajemen perusahaan beroperasi untuk kepentingan terbaik pemegang sahamnya bergantung pada tata kelola perusahaan, yang secara tradisional mengacu untuk berurusan dengan cara pemberi pinjaman untuk bisnis memastikan bahwa mereka akan menerima pengembalian atas investasi mereka. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa tata kelola perusahaan akan berdampak pada apakah opsi penghindaran pajak digunakan untuk kepentingan terbaik pemegang saham (Armstrong et al 2015). Tata kelola perusahaan pada kenyataannya didefinisikan oleh literatur sebagai penyelarasan antara tujuan pemegang saham dan manajer merupakan aspek penting dalam memahami penghindaran pajak perusahaan (Bauer, 2016).

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak cenderung berkonsentrasi pada karakteristik tingkat perusahaan (Shackelford dan Shevlin, 2001). Studi terbaru juga memperhitungkan hasil penghindaran pajak, termasuk dampak ekonomi. Karena masalah keagenan, yang telah menjadi subjek dari banyak penelitian baru-baru ini tentang penghindaran pajak, dampak ekonomi ini dapat bervariasi di antara manajemen, perusahaan, dan pemegang sahamnya. Ada banyak penelitian terbaru tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan penggelapan pajak perusahaan. Menanggapi penilaian literatur utama Hanlon dan Heitzman (2010), banyak publikasi jurnal yang telah diterbitkan, terutama dalam sepuluh tahun terakhir (Wilde & Wilson, 2018). Ada banyak penelitian tentang hubungan antara

tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak Penghindaran pajak secara luas didefinisikan untuk tujuan tinjauan literatur ini sebagai segala sesuatu yang menurunkan pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan sebelum pajaknya (Dyrenge, et al 2010). Jadi, terlepas dari agresif atau tidak penghindaran pajak yang dilakukan, dan terlepas dari penghindaran pajak dilakukan di bawah lingkup hukum atau dianggap sebagai tindakan kriminal, penelitian ini menangkap spektrum yang luas dari operasi penghindaran pajak. Perpaduan langkah-langkah yang memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan untuk kepentingan satu atau beberapa pemangku kepentingan (Goergen & Renneboog, 2006).

Untuk mengkonsolidasikan penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan, evaluasi menyeluruh terhadap literatur telah dilakukan. Evaluasi literatur sebelumnya di bidang ini seperti penelitian Shackelford & Shevlin (2001), Hanlon & Heitzman (2010) Wilde & Wilson (2018) memiliki jangkauan yang jauh lebih luas atau tidak secara eksplisit membahas tata kelola perusahaan. Sementara tata kelola perusahaan dibahas dalam penilaian terbaru oleh Wilde dan Wilson (2018), hanya disinggung secara singkat dan hanya memperhitungkan hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam penelitian ini berbeda dari literatur sebelumnya yaitu dilihat dari detail yang digunakan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak, dan penyertaan semua pemangku kepentingan yang mungkin terkait. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menerapkan teori keagenan pemangku kepentingan (Hill & Jones, 1992). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh kelompok faktor tata kelola perusahaan yaitu Penyelarasan insentif antara manajemen dan pemegang saham, Komposisi dewan, Struktur kepemilikan, Tekanan pasar modal, Audit, Penegakan dan hubungan pemerintah, dan Tekanan dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, klien, dan masyarakat umum—merupakan pendorong utama penghindaran pajak perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Teori agensi pemangku kepentingan*

Setiap tindakan yang mengurangi pajak perusahaan sehubungan dengan pendapatan sebelum pajak dianggap sebagai penghindaran pajak. Dari kepatuhan pajak penuh hingga perlindungan pajak hingga kecurangan pajak yang jelas melanggar hukum, penghindaran pajak dikonseptualisasikan sebagai rangkaian tindakan untuk menurunkan beban pajak. Tingkat dan agresivitas penghindaran pajak meningkat ketika perusahaan menyimpang dari kepatuhan pajak sepenuhnya. Menurut teori keagenan, dasar dari semua perkiraan penghindaran pajak adalah pembagian kepemilikan dan kontrol (Badertscher et al., 2013). Penghindaran pajak dapat dilihat sebagai salah satu dari banyak peluang investasi berisiko yang terbuka untuk manajemen karena meningkatkan arus kas setelah pajak (Armstrong et al., 2015). Penghindaran pajak adalah praktik yang berbahaya karena, jika ditemukan oleh otoritas fiskal, hal itu dapat mengakibatkan penyajian kembali yang meningkatkan kewajiban pajak, denda, dan kerugian reputasi perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009). Selain itu, konflik keagenan dapat menyebabkan agen memilih tingkat penghindaran pajak yang berbeda dari yang disarankan oleh prinsipal. Prinsipal mungkin menyukai penghindaran pajak yang tinggi, yang akan meningkatkan arus kas setelah pajak, atau penghindaran pajak yang rendah, yang akan mengurangi risiko perusahaan. Meskipun asumsi netralitas risiko mungkin sesuai untuk pemegang saham dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi, Blockholder besar merupakan pemegang saham yang memegang sebagian besar ekuitas sehingga diantisipasi lebih menghindari risiko karena kekayaan mereka terkonsentrasi di perusahaan yang lebih sedikit, meskipun asumsi netralitas risiko mungkin sesuai untuk pemegang saham dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi (Shleifer & Vishny, 1986). Dapat diasumsikan bahwa pemegang blok lebih memilih penghindaran pajak yang lebih sedikit sementara pemilik yang terdiversifikasi lebih cenderung menerima tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena pemegang blok besar diyakini lebih menghindari risiko dan penghindaran pajak akan sering melibatkan risiko.

Agen atau Manajemen memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dihindari selama sistem tata kelola perusahaan yang solid, seperti pemantauan yang efisien dan penyelarasan insentif, tersedia, manajer akan memilih tingkat yang disukai pemegang saham. Dalam hal perpajakan, ini menunjukkan bahwa lembaga tata kelola perusahaan berfungsi sebagai cara untuk mencegah perilaku manajerial yang tidak efektif dengan membiarkan sumber daya bisnis dikenakan pajak yang tinggi. Karena manajer dianggap menghindari risiko karena kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan karena tidak adanya struktur tata kelola perusahaan seperti itu. Manajer tidak akan bertindak secara efektif terhadap pajak yang tinggi, menunjukkan bahwa akan ada sedikit penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa pergeseran sewa manajerial dan penggelapan pajak berjalan seiring. Karena kurangnya transparansi perusahaan yang disebabkan oleh struktur buram yang diperlukan untuk menghindari pajak secara efektif (seperti pendirian anak perusahaan di suaka pajak atau penggunaan pembiayaan di luar neraca), manajer dapat mengalihkan pembayaran sewa dari pemilik untuk kepentingan mereka. keuntungan sendiri, yang mirip dengan manajemen laba. Manajer lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak jika ada kontrol tata kelola perusahaan yang lemah. Misalnya, ketika ada pengawasan yang tidak efektif dan pembayaran berbasis ekuitas tidak menyelaraskan insentif dengan tujuan pemilik. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa kompensasi insentif sebenarnya dapat mendorong manajer untuk mengambil lebih banyak risiko daripada kepentingan terbaik mereka.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur secara menyeluruh untuk melihat hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan literatur-literatur sebelumnya mulai dari tahun 2006 – 2022 sehingga artikel yang terkumpul sebanyak 33 artikel yang membahas tentang tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Beberapa artikel hanya membahas satu atau lebih dari aspek tata kelola perusahaan seperti ETR, insentif, peran pemegang saham, komposisi dewan, struktur kepemilikan perusahaan, auditor, dan pelanggan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
2006 USA Mihir A. Desai, et al	Corporate tax avoidance and high-powered incentives	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan pertumbuhan insentif berkekuatan tinggi bagi para manajer. Peningkatan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat perlindungan pajak, dengan cara yang konsisten dengan pelengkap hubungan antara pengalihan dan perlindungan. Penelitian ini juga menemukan efek negatif dari pengaturan tata kelola yang relatif lemah.
2009 USA Shuping Chen, et al	Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Sampel 1.003 perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilik keluarga bersedia untuk mengabaikan manfaat pajak untuk menghindari biaya bukan pajak dari diskon harga potensial, yang dapat timbul dari pemegang saham minoritas. kepemilik keluarga lebih peduli dengan potensi hukuman dan kerusakan reputasi dari IRS audit daripada perusahaan non-keluarga.
2010 Australia Roman Lanis, et al	The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari anggota luar di dewan mengurangi kemungkinan agresivitas pajak terjadi. AUDIT direksi memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara keanggotaan direksi dari luar dan agresivitas pajak. Dewan independen muncul untuk mencegah agresivitas pajak melalui tata kelola yang lebih baik.

	Sampel 32 Perusahaan	
2012 USA Christopher S. Armstrong, et al	The incentives for tax planning Sampel sebanyak 423 Perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa direktur pajak yang menerima insentif untuk mengurangi tingkat beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. kompensasi eksekutif pajak berhubungan negatif dengan GAAP ETR. Sebuah teori agensi interpretasi hasil ini adalah bahwa GAAP ETR relatif dapat dikendalikan oleh direktur pajak dan dapat diukur dengan presisi yang cukup sehingga membuatnya berharga untuk dikontrak. Sebaliknya, atribut pajak perusahaan lainnya tidak cukup dapat dikendalikan oleh direktur pajak dan/atau terlalu berisik sehingga tidak berharga untuk dikontrak.
2012 USA Sean T. McGuire, et al	Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference? 8.025 pengamatan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan audit eksternal mempengaruhi tingkat penghindaran pajak kliennya. perusahaan audit eksternal perusahaan terlibat dalam pajak yang lebih besar penghindaran ketika perusahaan audit eksternal perusahaan adalah ahli pajak. Karena perusahaan audit eksternal berpotensi mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak klien melalui penyediaan konsultasi pajak jasa dan audit laporan keuangan, penelitian ini juga memeriksa keseluruhan keahlian (yaitu, pajak gabungan dan keahlian audit) dari perusahaan audit eksternal adalah terkait dengan penghindaran pajak.
2012 USA C. S. Agnes Cheng, et al	The Effect of Hedge Fund Activism on Corporate Tax Avoidance .	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penelitian menunjukkan penghindaran pajak yang jauh lebih rendah daripada perusahaan kontrol perusahaan, karena diukur dengan tarif pajak efektif (ETR) dan perbedaan pajak buku (BTD). Penelitian ini menemukan perusahaan target mengalami peningkatan signifikan dalam penghindaran pajak setelah dana aktivis intervensi.
2013 USA John R. Graham, et al	Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 69 persen eksekutif menilai reputasi sebagai hal yang penting dan peringkat faktornya kedua dalam urutan kepentingan di antara semua faktor yang menjelaskan mengapa perusahaan tidak mengadopsi strategi perencanaan pajak yang potensial. 84 persen perusahaan publik menanggapi bahwa manajemen puncak di perusahaan perusahaan paling tidak peduli dengan GAAP ETR seperti halnya pajak tunai. insentif akuntansi keuangan berperan peran.
2013 USA Brad A. Badertschera, et al	The separation of ownership and control and corporate tax avoidance	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan ekuitas dan pengambilan keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya pada sejumlah kecil pembuat keputusan, manajer pemilik ini kemungkinan akan lebih menghindari risiko dan dengan demikian kurang bersedia untuk berinvestasi dalam proyek berisiko. Karena penghindaran pajak penghasilan adalah aktivitas berisiko yang dapat membebaskan biaya signifikan pada perusahaan. konsentrasi kepemilikan yang lebih besar dan kontrol (dan dengan demikian lebih banyak manajer yang menghindari risiko) menghindari pajak penghasilan yang lebih sedikit daripada perusahaan dengan kepemilikan yang kurang terkonsentrasi dan kontrol.
2014 USA Sean T. McGuire, et al	Dual Class Ownership and Tax Avoidance	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan antara hak suara dan hak arus kas dikaitkan dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai, yang menunjukkan bahwa manajer dengan hak kontrol yang berlebihan terlibat dalam penghindaran pajak yang jauh lebih sedikit.
2014 Malaysia Hairul Azlan Annuar, et al	Corporate ownership, governance and tax avoidance:	Hasil penelitian ini proposal berfokus pada hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan perencanaan pajak agresif perusahaan dan mengidentifikasi tiga bentuk yaitu kepemilikan perusahaan yang dapat

	An interactive effects	dikaitkan dengan agresivitas pajak. Identifikasi didasarkan pada potensi biaya dan manfaat dari agresivitas pajak dilihat dari perspektif teoritis.
2014 UK James A. Chyz Scott D. White	The Association between Agency Conflict and Tax Avoidance: A Direct Approach	Hasil penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan corporate governance tentang penghindaran pajak. konflik agensi berhubungan positif dengan aktivitas penghindaran pajak yang diukur dengan residual perbedaan buku-pajak. Penelitian ini juga menguji prevalensi kegiatan penghindaran pajak dalam pengaturan di mana konflik keagenan cenderung terjadi tinggi.
2016 USA Arthur Allen, et al	Analyst coverage and corporate tax aggressiveness	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peningkatan yang stabil dalam penggunaan perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan strategi dalam beberapa tahun terakhir telah memicu literatur yang berkembang tentang penentu perilaku perusahaan ini.
2016 USA Andrew Bird and Stephen A. Karolyi	Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan kepemilikan institusional menggunakan regresi pendekatan diskontinuitas yang mengeksplorasi sifat kuasi-acak dari inklusi indeks Russell 1000/2000 untuk perusahaan di sekitar pasar batas kapitalisasi.
2016 China Grant Richardson, et al	Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pada tingkat yang lebih rendah, peningkatan konsentrasi kepemilikan berhubungan positif dengan penghindaran pajak karena efek entrenchment akan tetapi di luar tingkat minimum yang diperlukan untuk pengendalian yang efektif.
2016 USA Henry He Huang, et al	Customer concentration and corporate tax avoidance	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsentrasi pelanggan korporat mengarah pada permintaan untuk lebih banyak kepemilikan uang tunai, lebih sedikit volatilitas keuangan, dan pendapatan yang lebih tinggi. Penghindaran pajak dapat mempengaruhi arus kas perusahaan, kesulitan keuangan, dan pendapatan melalui Perbedaan Buku-pajak sementara dan permanen.
2017 USA Mozaffar Khan, et al	Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak badan. konsentrasi kepemilikan memiliki kekuatan penjelas untuk variasi dalam penghindaran pajak.
2017 USA Kelvin K. F. Law, and Lillian F. Mills	Military experience and corporate tax avoidance	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh manajer dengan pengalaman militer, tetapi tidak berbagi karakteristik manajerial lainnya, memiliki kas yang lebih tinggi dan GAAP efektif tarif pajak, ukuran terluas untuk menangkap kontinum penuh pajak perusahaan perencanaan. Manajer ini juga mempertahankan cadangan yang lebih rendah untuk pajak yang tidak diakui manfaat, menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam strategi pajak yang kurang agresif, dan perusahaan membuat mengurangi penggunaan surga pajak.
2017 USA Thomas R. Kubick, and G. Brandon Lockhart	Overconfidence, CEO Awards, and Corporate Tax Aggressiveness	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jika terlalu percaya diri menyebabkan manajer melebih-lebihkan kinerja perusahaan kemampuan sendiri untuk menghasilkan pengembalian, yang mengarah ke kebijakan perusahaan yang lebih berisiko.
2017 Canada Justin Mindzak and Tao Zeng	Pyramid ownership structure and tax avoidance among Canadian firms	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan struktur piramida umumnya terlibat dalam lebih banyak pajak kegiatan penghindaran daripada perusahaan non-afiliasi, perusahaan yang berafiliasi dengan piramida yang lebih kompleks terlibat dalam lebih banyak penghindaran pajak praktik dan perusahaan yang terletak di tingkat piramida yang lebih rendah menghindari lebih banyak pajak.

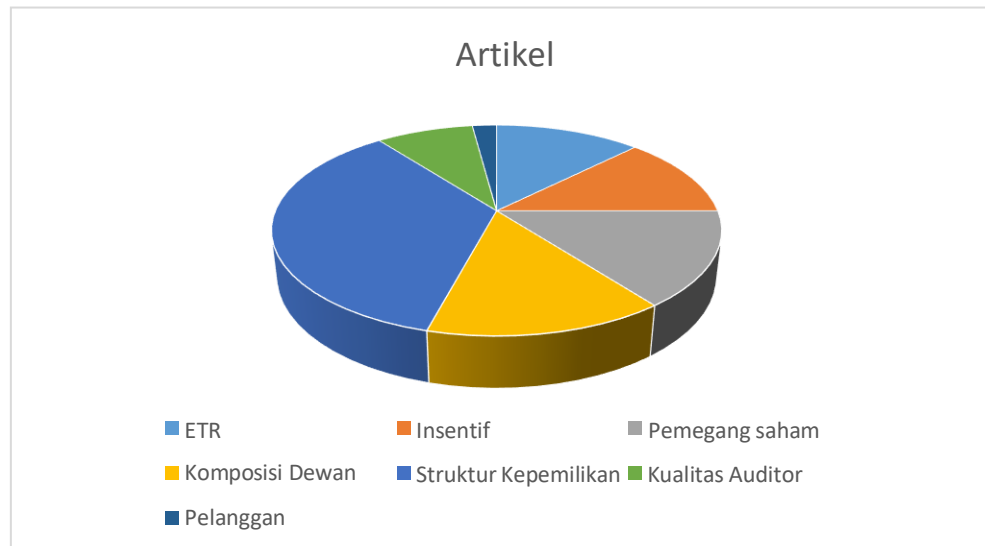
2017 Tunisia Safa Gaaya, et al	Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality	Hasil penelitian ini menemukan bahwa di perusahaan yang diawasi dengan baik, hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak berubah menjadi negatif. Keluarga mengurangi perilaku oportunistik perusahaan ketika perusahaan dipantau oleh kualitas audit eksternal yang tinggi.
2018 UK Pei-Hui Hsu, et al	Tax Avoidance, Financial Experts On The Audit Committee, And Business Strategy	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa anggota komite audit ahli keuangan menyesuaikan pendekatan untuk mengawasi proses perencanaan pajak perusahaan sesuai dengan bisnis strategi perusahaan. Penelitian ini juga menyelidiki sejauh mana kinerja direktur berperan ganda perusahaan sebagai penasihat dan pemantau sehubungan dengan pajak penghindaran berbeda di seluruh jenis strategi bisnis.
2018 China Mark Bradshaw, et al	Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan publik di Cina dan menemukan secara signifikan penghindaran pajak yang lebih rendah oleh BUMN dibandingkan dengan non-BUMN.
2018 China Xinyuan Chen, et al	State ownership, performance evaluation and tax avoidance	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kinerja BUMN mempengaruhi penghindaran pajak dan struktur modal. Di satu sisi, evaluasi kinerja memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan.
2018 Australia Ross McClure, et al	The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance and controlling for outside director monitoring	Hasil penelitian ini menyatakan dalam kombinasi, hasil ini menunjukkan heterogenitas biaya dan manfaat dari penghindaran pajak dan ini merupakan tantangan dalam mengevaluasi agresivitas pajak perusahaan secara umum, dan dampak dari tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak perusahaan pada khususnya.
2018 Italia Elisabetta Mafrolla	Tax avoidance in government-owned firms: Evidence from Italy	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki efek negatif sistematis pada tarif pajak efektif perusahaan/ Prevalensi kebijakan perencanaan pajak berfokus pada jangka panjang. Manajer perusahaan milik pemerintah berfokus pada meminimalkan biaya, bahkan jika ini merugikan pemungutan pajak-pendapatan nasional.
2018 Brazil Otávio Gomes Cabello, et al	Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan Brasil dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar hadir bukti tingkat yang lebih rendah dari perilaku penghindaran pajak. semakin besar konsentrasi kepemilikan di perusahaan Brasil tidak berarti penghindaran pajak kurang.
2018 USA Tien-Shih Hsieh, et al	Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perusahaan dengan CEO yang terlalu percaya diri dan CFO yang terlalu percaya diri lebih cenderung terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak ketika dibandingkan dengan perusahaan dengan kombinasi terlalu percaya diri CEO/CFO lainnya.
2019 Jerman Jost Kovermann and Martin Wendt	Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan keluarga menunjukkan lebih banyak penghindaran pajak relatif terhadap perusahaan non-keluarga, dan penghindaran pajak perusahaan keluarga meningkat dengan persentase dari kepemilikan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol menghasilkan pengambilan risiko yang lebih tinggi melalui penghindaran pajak oleh perusahaan keluarga yang menghasilkan arus kas setelah pajak yang lebih tinggi yang kemudian tersedia untuk pemegang saham pembayaran.

2020 Jordania Amneh Alkurdi, and Ghassan H. Mardini	The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajer dengan total kepemilikan saham yang lebih tinggi memiliki efek positif pada nilai ETR dan CFETR, dan ini menghasilkan pengurangan pajak praktik penghindaran.
2020 Iran Mahdi Salehi, et al	The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin lama hubungan kerja auditor-klien, semakin auditor dapat membantu klien untuk mengurangi pengeluaran pajak.
2020 Kirsten Cook, et al	Do Creditors Influence Corporate Tax Planning? Evidence from Loan Covenants	Dalam bab ini, kami menemukan bukti kuat bahwa hak kontrol kreditur mempengaruhi pajak perusahaan penghindaran. kreditur lebih memilih penghindaran pajak yang lebih tinggi, dan pelanggaran perjanjian menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam bentuk pajak yang kurang agresif penghindaran. Biaya agensi penghindaran pajak lebih besar daripada manfaat bagi pemegang saham sebelum pelanggaran perjanjian. peran menguntungkan dari intervensi kreditur berkonsentrasi di antara pelanggar yang memiliki tata kelola pemegang saham yang lebih lemah dan dengan demikian berinvestasi lebih sedikit dalam penghindaran pajak
2021 UK Anissa Dakhli	The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan penggunaan penghindaran pajak.
2022 UK Imen Khelil and Hichem Khlif	Tax avoidance in family firms: a literature review	Penelitian ini bersifat studi empiris yang meneliti hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak menunjukkan bahwasebagian besar dari mereka telah dilakukan di Jerman, Amerika Serikat danTaiwan dan negara-negara hukum perdata Eropa lainnya. Hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak adalah negatif di Amerika Serikat, Finlandia dan Belgia. Sebaliknya, hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak adalah positif dan signifikan di negara maju lainnya (Jerman dan Italia) dan negara berkembang (Brasil, India, Malaysia, dan Tunisia). Di Taiwan, dampak perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak bergantung pada opacity perusahaan yang mengurangi dampak negatif perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini merupakan literatur secara menyeluruh yang mengambil data dari artikel-artikel sebelumnya tentang hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindara pajak. Dalam beberapa tahun terakhir penelitian yang melakukan tentang penghindaran pajak lebih membahas pada sisi tata kelola perusahaan. Pada studi empiris dan akademis penghindaran pajak sangat diminati untuk diteliti dengan tata kelola sebagai penentu utama penghindaran pajak timbul sebagai aliran penelitian otonom (Hanlon &

Heitzman, 2010). Studi literatur ini merangkum temuan tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam observasi literatur yang dilakukan dengan menggunakan 33 artikel yang ditemukan mulai dari tahun 2006 - 2022 terdapat komposisi penelitian sebagai berikut:



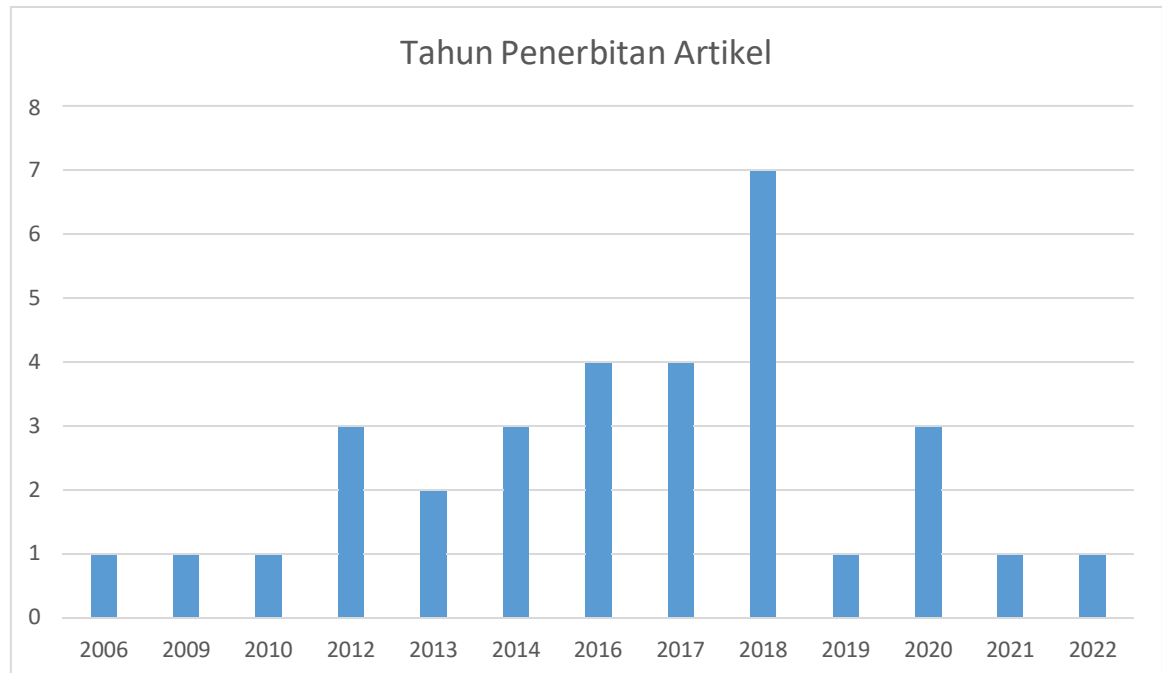
Gambar 1. Artikel yang digunakan dalam SLR

Dilihat dari grafik diatas terdapat 6 artikel yang menggunakan ETR sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (Christopher et al,2012., C. S. Agnes et al, 2012., Graham et al, 2014., Otávio et al, 2018., Amneh et al, 2020., Kirsten Cook, 2020). Sebanyak 6 Artikel menggunakan insentif sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (Desai et al, 2006., Armstrong et al, 2012., Graham et al, 2014., Mc Guire et al, 2014., Mark & Guanmin, 2018). Sebanyak 7 artikel yang menggunakan pemegang saham dan komposisi dewan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2010., Armstrong et al, 2012., Allen et al, 2016., Kubick et al, 2017., Hsu et al, 2018., Ross McClure et al, 2018., Hsieh et al, 2018). Sedangkan yang paling banyak digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan dengan 17 artikel (Chen et al, 2009., Badertscher et al, 2013., Mc Guire et al, 2014., Hairul Azlan et al, 2014., Andrew Bird & Stephen, 2016., Richardson et al, 2016., Khan et al, 2017., Justin & Tao, 2017., Gaaya et al, 2017., Bradshaw et al, 2019., Xinyuan et al, 2018., Elisabetta, 2018., Otávio et al, 2018., Jost, 2019., Amneh & Ghassan, 2020., Anissa , 2021., Imen & Hichem, 2022) . Sebanyak 4 artikel menggunakan kualitas auditor sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (Mc Guire et al, 2014., Gaaya et al, 2017., Hsu et al, 2018., Mahdi et al, 2020) . Dan yang terakhir ada 1 artikel yang menggunakan pelanggan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel-variabel ini mewakili tata kelola perusahaan dalam penelitian sebelumnya (Huanga et al, 2016).

Artinya jika dilihat dari grafik diatas trend penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak banyak dilakukan dengan menggunakan variabel struktur kepemilikan perusahaan. struktur kepemilikan perusahaan dibentuk oleh kehadiran pemegang blok besar (La Porta et al 1999). Pemegang saham kecil dalam struktur yang tersebar tidak memperoleh keuntungan dari manajemen pemantauan, tetapi pemegang blok besar (Shleifer & Vishny, 1986). Menurut Khurana dan Moser (2013), perusahaan yang dikendalikan oleh investor institusi dengan fokus jangka panjang, seperti dana pensiun, yang seringkali lebih menghindari risiko, menghindari pajak lebih sedikit. Peningkatan kepemilikan institusional dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak (Huseynov et al, 2017). Namun, penghindaran pajak turun untuk sekelompok perusahaan terbatas jika sudah tinggi sebelum investor institusi terlibat dan investor membeli saham di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusi dapat menekan

mitra investasi mereka untuk mengadopsi tingkat pajak tertentu. Kepemilikan keluarga dengan saham besar dan sering mengendalikan dalam satu perusahaan adalah salah satu jenis investor berorientasi jangka panjang. Gaaya, Lakhal, dan Lakhal (2017), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga biasanya meningkatkan penghindaran pajak, memberikan data yang kontradiktif dan memprioritaskan kepentingan keuangannya sendiri di atas kepentingan pemegang saham minoritas. Penafsiran ini memperluas argumen rent-extraction Desai dan Dharmapala (2006) untuk memasukkan potensi konflik prinsip-prinsip. Menurut Chen et al (2010), bisnis milik keluarga biasanya menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis lain, mungkin karena mereka lebih menghindari risiko karena keinginan untuk melindungi bisnis untuk generasi mendatang.

Dilihat dari tahun terbitan artikel yang meneliti tentang penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Tahun Penerbitan Artikel

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa trend penelitian penghindaran pajak dilakukan dari periode tahun 2006 – 2022 dengan trend paling banyak diterbitkan di tahun 2018 oleh para peneliti akademisi yang rata-rata di publis di jurnal internasional bereputasi dengan range quarti mulai dari quarti 1 sampai quartil 4 yang digunakan dalam studi literatur ini. Artinya banyak penelitian penghindaran pajak dilakukan dan diterbitkan pada tahun 2018.

Beberapa penelitian melihat dari pembayaran insentif dan pengaruhnya terhadap penggelapan pajak. Menurut Phillips (2003), memberi insentif kepada manajer unit bisnis berdasarkan hasil setelah pajak menurunkan ETR. Maka manajer memiliki motivasi yang jauh lebih besar untuk menurunkan biaya pajak jika mereka dibayar setelah pajak. Powers et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi menggunakan pengukuran arus kas daripada kriteria pendapatan untuk menentukan gaji. Jenis lain dari insentif manajerial adalah persaingan di antara para eksekutif untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di dalam perusahaan (insentif turnamen). Menurut Kubick dan Masli (2016), insentif turnamen memiliki dampak menguntungkan pada penghindaran pajak karena mendorong eksekutif untuk mengambil risiko guna memaksimalkan peluang mereka untuk dipromosikan. Namun, Chi et al (2017) menemukan bahwa pembayaran insentif memiliki dampak

negatif pada penghindaran pajak (yaitu tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah) dalam keadaan ketika perusahaan membayar sebagian besar remunerasi CEO di masa depan.

Pemegang saham mendelegasikan fungsi manajemen dan kontrol kepada dewan direksi, yang pada gilirannya memberikan sebagian besar tugas manajemen kepada karyawan internal karena pengetahuan orang dalam yang luas tentang perusahaan, para manajer internal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dewan. Akibatnya, agen mungkin akhirnya bekerja sama atau mengatas nama klien mereka untuk mengambil sumber daya dari perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Ini dirancang untuk menciptakan persaingan di antara direktur manajerial dalam mengejar kepentingan pemegang saham dengan menambahkan direktur independen. Lanis dan Richardson (2011) mengemukakan bahwa perusahaan dengan bagian yang lebih tinggi dari direktur independen menampilkan penghindaran pajak yang lebih sedikit, berbeda dengan Minnick dan Noga (2010) yang tidak menemukan hubungan yang meyakinkan antara dewan dan hasil pajak. Sedangkan Lanis dan Richardson (2018), menemukan bahwa yang menekankan nilai direksi luar untuk penghindaran pajak, juga memberikan data pendukung. Semua hasil penelitian tersebut menunjukkan dampak negatif dari dewan yang kuat dan independen dalam penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan dalam penelitian yang digunakan sebagai indikatornya adalah kepemilikan keluarga dan kepemilikan non-keluarga. Para pemegang saham yang sangat terdiversifikasi kurang tertarik pada perusahaan tertentu karena pertimbangan biaya, posisi pemegang saham relatif terhadap manajemen lemah dalam struktur kepemilikan yang tersebar (Fama, 1980). Sebaliknya, melalui pengendalian yang efektif oleh pemegang blok besar, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi meningkatkan posisi pemegang saham relatif terhadap manajemen (Shleifer & Vishny, 1986). Untuk perusahaan publik, kepemilikan dan kendali seringkali dipisahkan. Perusahaan publik memiliki BTD lebih besar daripada perusahaan swasta yang bisa menjadi tanda penghindaran pajak (Mills & Newberry, 2001). Hal ini sesuai dengan temuan Badertscher et al. (2013) bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham manajemen yang lebih besar membayar pajak lebih sedikit daripada perusahaan lain. Akan tetapi hasil yang ditemukan oleh Mc Guire et al. (2014) tentang efek kepemilikan kelas ganda tidak mendukung temuan ini. Meskipun kedua kelas memiliki hak arus kas yang sama, kepemilikan kelas ganda menciptakan kelas inferior dengan satu suara per saham dan kelas superior dengan banyak suara per saham. Struktur kelas ganda merupakan bentuk ekstrim dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dan dapat mengakibatkan manajer menjadi kurang akuntabel kepada pemegang saham karena hanya pemegang saham yang tergolong kelas atas yang memiliki kewenangan untuk memecat manajer. Menurut McGuire et al. (2014), penghindaran pajak lebih jarang terjadi di perusahaan kelas ganda daripada di perusahaan kelas tunggal. Ketika manajer diberikan kebebasan untuk bekerja di bawah standar (yaitu, tidak mengurangi kewajiban pajak) tanpa khawatir kehilangan pekerjaan mereka. Akibatnya, ada informasi yang bertentangan mengenai apakah pemisahan kepemilikan dan kontrol mempengaruhi penghindaran pajak secara positif atau buruk. Richardson, Wang, dan Zhang (2016) mengusulkan hubungan berbentuk U terbalik antara konsentrasi kepemilikan dan penghindaran pajak sebagai cara yang mungkin untuk menyelesaikan hasil yang berbeda.

Audit eksternal atas laporan tahunan adalah salah satu sumber pemantauan eksternal yang paling signifikan. Salah satu aspek perikatan audit adalah untuk menilai bagaimana hal-hal terkait pajak beban pajak dan pajak tangguhan yang diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika dewan direksi berusaha meminta pertanggungjawaban auditor atas kelemahan terkait pajak dalam laporan keuangan, penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan dapat meningkatkan risiko tuntutan hukum auditor (Donohoe & Knechel, 2014). Perpanjangan hubungan antara auditor dan klien dapat berdampak negatif pada independensi auditor karena objektivitas auditor yang menurun dari waktu ke waktu, tujuan program rotasi audit eksternal adalah untuk membatasi masa kerja auditor. Kualitas laba yang lebih rendah dikaitkan dengan masa kerja yang lebih lama (Dao et al, 2008). Kapasitas auditor untuk meningkatkan kuasi-sewa dari hubungan yang sedang berlangsung merupakan penjelasan yang sering untuk hal ini, yang dapat meningkatkan minat dalam mempertahankan hubungan. Dengan menerapkan

hal ini pada penghindaran pajak dapat diperkirakan bahwa masa jabatan akan meningkatkan penghindaran pajak karena auditor akan menjadi kurang waspada. Rotasi audit wajib dengan demikian membatasi pekerjaan dan mungkin memiliki dampak yang merugikan pada penggelapan pajak. Namun, rotasi atau masa jabatan audit tidak secara konsisten dikaitkan dengan kualitas laba yang lebih tinggi (Blouin et al, 2007).

5. KESIMPULAN

Studi literatur tentang penghindaran pajak saat ini disertai dengan minat publik yang besar terhadap topik tersebut. Penelitian empiris tentang penghindaran pajak perusahaan telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Sementara publik jarang bertanya tentang motivasi di balik penghindaran pajak dan hanya memperhatikan sejumlah kecil kasus profil tinggi, studi empiris dapat mengungkapkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Sebagai hasil dari panggilan yang dibuat di Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan bahwa aliran penelitian independen yang berfokus pada tata kelola perusahaan sebagai faktor penting dalam penghindaran pajak muncul. Tren penelitian yang ditemukan dalam studi literatur ini adalah menggunakan variabel struktur kepemilikan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Struktur kepemilikan dalam penelitian yang digunakan sebagai indikatornya adalah kepemilikan keluarga dan kepemilikan non-keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari sistem tata kelola perusahaan yang berbeda pada penghindaran pajak bergantung pada kepentingan pemangku kepentingan mana yang disalurkan oleh masing-masing mekanisme individu setelah mensintesis hasil penelitian yang dipublikasikan. Akibatnya, sejauh mana perusahaan menghindari pajak bergantung pada kepentingan pemangku kepentingan dan kapasitas mereka untuk mengejar kepentingan tersebut melalui prosedur tata kelola perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan dari pemangku kepentingan yang berbeda sehubungan dengan penghindaran pajak, mengarahkannya ke tingkat yang terbaik untuk organisasi tertentu dan membawa biaya pembayaran pajak dan biaya penghindaran pajak ke dalam keseimbangan. Sehingga semakin tinggi penghindaran pajak akan menghasilkan peningkatan biaya penghindaran (bukan pajak) yang lebih besar daripada manfaat penghindaran pajak, sedangkan semakin rendah penghindaran pajak akan mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran pajak yang lebih besar dari keuntungan membayar pajak.

REFERENSI

- [1] Allen, A., Francis, B. B., Wu, Q., & Zhao, Y. (2016). Analyst coverage and corporate tax aggressiveness. *Journal of Banking & Finance*, 73, 84–98
- [2] Armstrong, C., Blouin, J., & Larcker, D. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 391–411.
- [3] Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60, 1–17
- [4] Austin, C.R. and Wilson, R.J. (2017) An examination of reputational costs and tax avoidance: Evidence from firms with valuable consumer brands. *The Journal of the American Taxation Association* 39(1): 67–93.
- [5] Badertscher, B., Katz, S., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56, 228–250

- [6] Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *The Accounting Review*, 87, 91–120
- [7] Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67, 255–277.
- [8] Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.
- [9] Demski, J. S., & Feltham, G. A. (1978). Economic incentives in budgetary control systems. *The Accounting Review*, 53, 336–359.
- [10] Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145–179.
- [11] Donohoe, M. P., & Knechel, R. W. (2014). Does corporate tax aggressiveness influence audit pricing? *Contemporary Accounting Research*, 31, 284–308.
- [12] Hairunl Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihun, Siti NORMALA Sheikh Obid. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects*.
- [13] Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32, 731–744
- [14] Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2014). Incentives for tax planning and avoidance: Evidence from the field. *The Accounting Review*, 89, 991–1023.
- [15] Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93, 126–141
- [16] Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- [17] Huang, H. H., Lobo, G. J., Wang, C., & Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. *Journal of Banking & Finance*, 72, 184–200.
- [18] Hsieh, T.-S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37, 241–253.
- [19] Hsu, P.-H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45, 1293–1321.
- [20] Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *The Accounting Review*, 92, 101–122
- [21] Kubick, T. R., & Lockhart, G. B. (2017). Overconfidence, CEO awards, and corporate tax aggressiveness. *Journal of Business Finance & Accounting*, 44, 728–754
- [22] Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30, 50–70.
- [23] Mills, L., & Newberry, K. (2001). The influence of tax and nontax costs on book-tax reporting difference: Public and private firms. *The Journal of the American Taxation Association*, 23(1), 1–19.
- [24] Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16, 703–718.
- [25] McGuire, S., Omer, T., & Wang, D. (2012). Tax avoidance: Does tax-specific industry expertise make a difference? *The Accounting Review*, 87, 975–1003.

- [26] Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12, 141–158.
- [27] Shackelford, D.A. and Shevlin, T. (2001) Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics* 31(1–3): 321–387.
- [28] Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. *Journal of Political Economy*, 94, 461–488.
- [29] Wwww.mediaindonesia.com. Di akses pada 27 Januari 2018
- [30] Xynas, Lidia.2011.Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010.The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance, *Revenue Law Journal*.20-1.
- [31] [10] Veropoulos, K., Learmonth, G., Campbell, C., Knight, B., & Simpson, J. (1999). Automated identification of tubercle bacilli in sputum: A preliminary investigation. *Analytical and Quantitative Cytology and Histology*, 21(4), 277–281
- [32] [11] Wilkinson, M. (1996). Rapid automatic segmentation of fluorescent and phase-contrast images of bacteria. *Fluorescence Microscopy And Fluorescent Probes*. New York, NY: Plenum Press.